

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENDAMPING KONTRAK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - b. bahwa sehubungan dengan besaran jangkauan wilayah, diperlukan adanya sumber daya manusia yang dapat membantu dalam perencanaan kontrak sampai dengan penyelesaian masalah kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah tentang Tim Pendamping Kontrak Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

- 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM PENDAMPING KONTRAK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU

Menetapkan Tim Pendamping Kontrak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pendamping Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan telaah dan analisis dalam memberikan saran dan masukan mulai dari merancang, mengendalikan pelaksanaan atau mitigasi risiko kontrak; dan
 - b. memberikan solusi terkait permasalahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan dan peraturan yang berlaku.

KETIGA

Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan penugasan kepada Tim Pendamping Kontrak berdasarkan kompetensi yang dimiliki secara personal atau dibentuk suatu tim.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi, konsultasi, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau Instansi

Pemohon Tim Pendamping Kontrak.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau diganti.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Oktober 2020 DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,

> > ttd

IKAK G. PATRIASTOMO

Tembusan Yth:

- 1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2. Sekretaris Utama;
- 3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
- 4. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
- 5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG

HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TENTANG TIM

PENDAMPING KONTRAK PADA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

NOMOR : 8 Tahun 2020

TANGGAL : 22 Oktober 2020

TIM PENDAMPING KONTRAK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
1	Abdul Farid Hasan	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara
2	Abdul Haris	BPSDM Pemerintah Provinsi Aceh	Aceh
3	Abdul Kadir	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
4	Abdulwahid Saraha	Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara
5	Acep Much Parlan	Badan Pengusahaan Batam	Kepulauan Riau
6	Achmad Sugianto Hadi Sumarto	DPD IAPI Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
7	Achmad Zikrullah	Kementerian Keuangan	DKI Jakarta
8	Ade Kristianto	Universitas Palangka Raya	Kalimantan Tengah
9	Ade Kristiawan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Jawa Tengah
10	Agus Kurniawan	Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Papua
11	Agus Nain Sahabat	Dinas Binamarga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
12	Agus Yusuf Arianto	Konsultan Individu	Jawa Timur

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
13	Ahmad Ari Pandi Harahap	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara
14	Ahmad Khulaemi	Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM	DKI Jakarta
15	Aisah Ahmad	Sekretariat Daerah Kota Ternate	Maluku Utara
16	Akmal Muhamad Ridwan	Pemerintah Kota Depok	Jawa Barat
17	Albert Pramono Soesanto	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen	Jawa Tengah
18	Alfeatra Rapa	Sekretariat Daerah Kota Jayapura	Papua
19	Alfi Syukri Rama	UIN IB Padang	Sumatera Barat
20	Alfonsus Riko Rinaldi	Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	Jawa Tengah
21	Amik Tri Istiami	Pusdiklat Kementerian Agama	Banten
22	Aminuddin Ilham Sanusi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tual	Maluku
23	Anang Agus Susilo	RSUD Nganjuk	Jawa Timur
24	Anang Dwi Resdianto	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember	Jawa Timur
25	Anderson	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga	Jawa Tengah
26	Andi Juana Fachruddin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur	Sulawesi Selatan

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
27	Andi Lanna	Sekretariat Daerah Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan
28	Andi Muhammad Arpan	BPSDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
29	Andrizky	Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
30	Anwar Subianto	PT. Procurindo Selaras Mandiri	Jawa Tengah
31	Ardi Kasmono	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
32	Ari Purwadi Mokoginta	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sulawesi Utara
33	Ari Puspitasari	Sekretariat Daerah Kota Kediri	Jawa Timur
34	Arid Ahmad Ridwan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DKI Jakarta
35	Arthur Halik Razak	Politeknik Negeri Ujung Pandang	Sulawesi Selatan
36	Asman Dila	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor	Jawa Barat
37	Atty Aryanti Saraswati	Institut Teknologi Bandung	Jawa Barat
38	Azwar Nafarin	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
39	Baharuddin Dwi Isnanto	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kalimantan Tengah
40	Baihaki	DPD IAPI Jakarta	DKI Jakarta
41	Bambang Alamsyah	Konsultan Individu	Jawa Barat
42	Baskoro Ari Wibowo	Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta
43	Benny Mansjur	Komisi Informasi	Sulawesi Selatan
44	Billy Thandy Tulungen	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
45	Binsar Leonardus Simamora	Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang	Banten
46	Budi Sukiswo	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman	DI Yogyakarta
47	Buyung Dodi Gunawan	BPSDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
48	Carles M Simamora	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung	Jawa Barat
49	Cecep Fauzy Chaidir	Konsultan Individu	Jawa Barat
50	Christian Gamas	Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat	Kalimantan Timur
51	Davli	Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Sumatera Barat
52	Deby Sandra	RSUP. Dr. M. Djamil Padang	Sumatera Barat
53	Dedi Yuneldi	Sekretariat Daerah Kota Padang	Sumatera Barat
54	Denny Wijaya Permana	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kepulauan Bangka Belitung
55	Des Indri Prihantony	BPSDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
56	Dewa Gde Padmayasa	Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar	Bali
57	Dewa Ngakan Ketut Widnyana Maya	Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli	Bali
58	Dewi Larasati	Institut Teknologi Bandung	Jawa Barat
59	Dicky Rakhmadi	Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar	Riau
60	Djuliman Bale	Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Sulawesi Utara
61	Doni Tondo Setiaji	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus	Jawa Tengah

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
62	Eka Wara Marthianti	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	DKI Jakarta
63	Emilia	RSUP Dr M Djamil Padang	Sumatera Barat
64	Endah Fitri Susanti	STMM "MMTC" Yogyakarta Kementerian Komunikasi dan Informatika	DI Yogyakarta
65	Endang Kartika Sari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri	Jawa Timur
66	Endra Mayendra	Komisi Informasi	Kepulauan Riau
67	Escher Kalapadang	Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan
68	Fadhlil Khaliq Irawan	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
69	Fahrurrazi	Sekretariat Daerah Kota Sukabumi	Jawa Barat
70	Faradillah Yusuf Liputo	Sekretariat Daerah Kabupaten Poso	Sulawesi Tengah
71	Farida Abdul Abbas	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara
72	Felleps Wuisan	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara
73	Ferry Hendri Koerniawan	Pemerintah Daerah Kota Mojokerto	Jawa Timur
74	Frans Budiman Johannes	Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur
75	Galuh Tantri Narindra	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Kabupaten Banjar	Kalimantan Selatan
76	Gusti Noviar Kusuma	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan
77	Hamdani Agus	Institut Seni Indonesia Padang Panjang	Sumatera Barat
78	Haerul Imam	Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat
79	Handoyo Nugroho	Sekretariat Daerah Kota Surakarta	Jawa Tengah
80	Hasnah Arief	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
81	Hendriansyah	RSUP Dr. Rivai Abdullah	Sumatera Selatan

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
82	Heni Mariati	Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas	Kalimantan Tengah
83	Henry	Politeknik Negeri Padang	Sumatera Barat
84	Hera Gunandar	Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Bengkulu
85	Heriyanto Prabowo Aji	Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Jawa Tengah
86	Hernaning Rangga Dhyta Utama	Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	Lampung
87	Herry Iskandar	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ketapang	Kalimantan Barat
88	Hery Suroso	Universitas Negeri Semarang	Jawa Tengah
89	I Dewa Agung Gede Manu	RSUD Bali Mandara Provinsi Bali	Bali
90	I Made Agus Darmaputra	Kementerian Keuangan	DKI Jakarta
91	I Made Budi Adiana	Sekretariat Daerah Provinsi Bali	Bali
92	I Made Sudarsana	Konsultan Individu	Bali
93	Ida Asani	Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
94	Idham	Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Aceh
95	Ika Kurnia Mustika	Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
96	Iksan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara
97	Ilham Achmad	Universitas Sriwijaya	Sumatera Selatan
98	Imam Tri Mindaryanto	Kementerian Perhubungan	Sulawesi Tengah
99	Indra Gunawan	Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan
100	Irawaty Imran	Konsultan Individu	DKI Jakarta
101	Irwan	Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
102	Ishak Siregar	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Jawa Barat
103	Isriadi Putranto	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar	Jawa Tengah
104	Iwan Kustiawan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar	Jawa Barat

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
105	Jimmi Zikria	Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar	Aceh
106	Juni Irawati	Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Bengkulu
107	Kadek Agus Putra Sastrawan	Sekretariat Daerah Provinsi Bali	Bali
108	Khalid Mustafa	Firma KM & Partners	DKI Jakarta
109	Kurniawan Ilyas	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
110	Kusyanto	Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Jawa Tengah
111	La Ode Abdul Nafis	Sekretariat Daerah Kabupaten Buton	Sulawesi Tenggara
112	Lutfin Muhammad	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara
113	M. Muklis Isnaini	Sekretariat Daerah Kota Kediri	Jawa Timur
114	Mahaputera Kesumanegara Saputra	Universitas Negeri Jakarta	DKI Jakarta
115	Mahdi Syamri	Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI	DKI Jakarta
116	Mandar Trisno Hadisaputra	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan	Sulawesi Selatan
117	Masrif	Politeknik Kesehatan Kendari	Sulawesi Tenggara
118	Mauladi Widodo	Konsultan Individu	Jawa Tengah
119	Mina Ayu Roswyda	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan
120	Mirhan Triandi Doe	Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara	Sulawesi Tengah
121	Misbakhul Munir	Universitas Jenderal Soedirman	Jawa Tengah

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
122	Moch Achmad Lilik Cholid Imam Buchori	Kementerian Keuangan	DKI Jakarta
123	Mohammad Kemal Pasha	International Fund for Agricultural Development	DKI Jakarta
124	Mokhamad Kholid	Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
125	Muhamad Aris Daud	Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	Sulawesi Tenggara
126	Muhamad Kasman	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
127	Muhammad Alfian Amri	Dinas Ketahanan Pangan	Sulawesi Selatan
128	Muhammad Fajuri	Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang	Banten
129	Muhammad Kahar Akbar Palinrungi	Universitas Negeri Makassar	Sulawesi Selatan
130	Muhammad Nur Yahya	Universitas Syiah Kuala	Aceh
131	Muhammad Yusuf	Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua	Papua
132	Muhari	Universitas Mulawarman	Kalimantan Timur
133	Mujiono	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua	Papua
134	Mulyadi	Sekretariat Daerah Kota Depok	Jawa Barat
135	Mustofa	Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	Jawa Timur
136	Mustofa Kamal	Pusdiklatwas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Jawa Barat
137	Mutiara Ramadhani Kusumadewi	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Kalimantan Selatan
138	Nasridal Patria	BPSDM Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
139	Nosin	Bagian Umum dan Pengadaan Lembaga Administrasi Negara	DKI Jakarta
140	Nova Zanda	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DKI Jakarta
141	Nur Aliuddin	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kubu Raya	Kalimantan Barat
142	Nursiah	Pusat Kanker Nasional RS Kanker Dharmais Kementerian Kesehatan	DKI Jakarta

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
143	Ovan Patuang Putra	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Luwu Utara	Sulawesi Selatan
144	Permana Hendrawangsa	Universitas Siliwangi	Jawa Barat
145	Raharjo	Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang	Banten
146	Rahfan Mokoginta	Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu	Sulawesi Utara
147	Rakhmat Thahir	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju	Sulawesi Barat
148	Raymon Budi Hermanto	Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta
149	Refdizalis	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat
150	Reflus	DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia	DKI Jakarta
151	Reni Warti Akmaludin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo	Jambi
152	Rifda Arafah	Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Bengkulu
153	Ririh Sudirahardjo	Konsultan Individu	Jawa Tengah
154	Risdiani	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
155	Risto Naibaho	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DKI Jakarta
156	Riswan	UIN Antasari	Kalimantan Selatan
157	Rohana Litasmi	Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu	Bengkulu
158	Rony Novian	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau	Kalimantan Tengah

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
159	Rudi Suhendra	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
160	Saifudin Zuhri	Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung	Jawa Timur
161	Sanusi Burhanudin	Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik	Jawa Timur
162	Setyanto Putro	ISI Yogyakarta	DI Yogyakarta
163	Sinta Posmaria Silalahi	Direktorat Jenderal Bina Marga - BPJN Jambi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jambi
164	Slamet Sudaryo	Pusat Kajian dan Studi Kebijakan Publik	Jambi
165	Slamet Suhariadi	Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia	Kalimantan Timur
166	Soepartono	DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia Jawa Tengah	Jawa Tengah
167	Sohna Musaad	Sekretariat Daerah Provinsi Papua	Papua
168	Son Magenda Ardiwinata	Konsultan Individu	Jawa Timur
169	Sri Evi Rizkiana Hasibuan	Sekretariat Daerah Kabupaten Solok	Sumatera Barat
170	Sri Wiharnanto	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Jawa Tengah
171	Subandi	Badan Pengusahaan Batam	Kepulauan Riau
172	Sudiharto	Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan	Jawa Timur
173	Sugianto Eko Prambudi	Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat
174	Suhariyanto	Politeknik Negeri Malang	Jawa Timur

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
175	Suharsono Bambang Setyawan Sasimartojo	Konsultan Individu	Jawa Timur
176	Sukri	Sekretariat Daerah Kabupaten Maros	Sulawesi Selatan
177	Suratmo	Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia	Banten
178	Suroso	Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia	Kalimantan Tengah
179	Suryamiharja	Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari	Papua Barat
180	Susan Apriliyan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan	Jawa Tengah
181	Sustiwati	RS Dr. Sardjito	DI Yogyakarta
182	Sutan Rusdi	Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo	Gorontalo
183	Sutarno	Konsultan Individu	DKI Jakarta
184	Syafrizal	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
185	Syafruddin	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang	Jawa Timur
186	Syafruddin A. Mahurati	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu	Sulawesi Tengah
187	Takdir Ali Mahmud	Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara	Maluku Utara
188	Tatang Sontani	Sekretariat Daerah Kabupaten Batang	Jawa Tengah
189	Tatang Sontani	Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
190	Taufik Hidayat	Universitas Andalas	Sumatera Barat
191	Taufiqurrahman	Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Kalimantan Selatan
192	Tomy Darlinanto	Sekretariat Daerah Gunungkidul	DI Yogyakarta
193	Tri Wahyu Rubianto	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Kepulauan Riau

NO	NAMA	INSTANSI	PROVINSI
194	Untung Yasril	Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sumatera Selatan
195	Vidi Januardani	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DKI Jakarta
196	Wahyu Tri Prasetyo	Sekretariat Daerah Kota Magelang	Jawa Tengah
197	Wirsanto Palangan	Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara	Sulawesi Selatan
198	Wiwik Widyawati Mayang	Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo	Gorontalo
199	Yahyah	Universitas Nusa Cendana	Nusa Tenggara Timur
200	Yanes Gusman Panie	Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur
201	Yanuar Wijayanto	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan	Jawa Barat
202	Yasip Khasani	RSUD Dr Moewardi	Jawa Tengah
203	Yeffri Purnama	Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
204	Yohannes Royas Noples Situmorang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asahan	Sumatera Utara
205	Yori Feriyandi	Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Kalimantan Utara
206	Yudi Santosa	Sekretariat Daerah Kota Kediri	Jawa Timur
207	Yustus	Sekretariat Daerah Kota Jayapura	Papua

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH,

ttd

IKAK G. PATRIASTOMO